



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hamdan Pare**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Nusa Tenggara II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Hamdan Pare

NIP. 197005102009111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan kumuh	2 Laporan
		2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	436 Unit
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	115 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II
- 2 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT

PAGU APBN

Rp	531.574.000,00
Rp	11.456.682.000,00
Rp	11.988.256.000,00

Jakarta, 18 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRIANI NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II


HAMDAN PARE